

## Polisi Kantongi Bukti Fotokopi .....

Dari Halaman 1

wan, Kamis (15/5).  
"Kemudian ada beberapa dokumen, fotokopi ijazah. Kemudian ada print out legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar penge-sahan," imbuhnya.  
Ade Ary menegaskan, pihaknya tak memiliki bukti berupa ijazah asli milik Jokowi. Melainkan hanya fotokopi ijazah tersebut.  
"Fotokopi, tadi saya jelaskan fotokopi. Fo-tokopi ya. Ini masih tahap penyelidikan," ucap dia.  
Sebelumnya, Ade Ary menerangkan laporan tersebut bermula saat Jokowi selaku pelapor sekaligus korban melihat video yang berisi dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terha-dap dirinya.

## Kasmudjo Bukan Dosen Pembimbing Jokowi

Dari Halaman 1

"Bukan sama sekali," kata Kasmudjo saat ditemui di kediamannya, Pogung, Mlati, Sleman, DIY, Rabu (14/5) sore.  
Kasmudjo menegaskan, dosen pembimbing skripsi Jokowi kala kuliah di Fakultas Kehu-tanan UGM adalah Prof Sumitro.  
"Ja mengungkap kariernya di UGM sebagai calon dosen dimulai pada 1975 silam. Saat Jokowi kuliah tahun 1980-1985, dia masih menjadi dosen golongan IIB atau asisten dosen, sehingga belum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa.  
Interaksinya sebagai asisten dosen dengan mahasiswa kala itu hanya sebatas membantu me-mahami mata kuliah atau teori-teori pada buku. Baru tahun 1986 dia naik jadi golongan IIIC.  
"Kalau selama Pak Jokowi kuliah itu saya hanya mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran-pelajaran sendiri," kenangannya.  
"Saya mulai mengajar itu mungkin setelah

"Kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban," kata Ade Ary kepada wartawan, Kamis (15/5).  
Selanjutnya, Jokowi meminta kepada ajudan dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial.  
"Dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan di antaranya oleh yang pertama RHS yang kedua RSN yang ketiga TT yang keempat ES dan yang kelima KTR," tutur Ade Ary.

IIIId atau mungkin ke IVa, itu mungkin karena saya punya sebagai ketua laboratorium sendiri, yaitu yang berkaitan dengan non kayu dan mebel, saya najgar di situ. Artinya produk-produk hutan yang selain dari kayu dan mebel," paparnya.  
Kasmudjo purnatugas dari UGM pada 2014 lalu, dengan total masa pengabdian sebagai dosen selama 38 tahun. Kini, namanya kembali disorot di tengah polemik dan tudingan ijazah palsu Jokowi.  
Jokowi juga menyempatkan waktunya berkunjung ke kediaman Kasmudjo, Senin (12/5) kemarin. Momen pertemuan keduanya dibagikan melalui akun Instagram resmi milik Jokowi.  
Menurut Kasmudjo, ini adalah pertemuan mereka pertama setelah sekian tahun. Jokowi datang ke rumahnya Senin pagi dan keduanya berbincang selama kurang lebih 45 menit.  
Selama itu pula, klaim Kasmudjo, Jokowi juga tak membawa topik menyangkut polemik ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikelu-arkan oleh UGM.  
"Enggak, enggak. Sama sekali (tidak diperbincangkan)," kata Kasmudjo.  
Jokowi juga disebut tak menyinggung soal

Namun, lantaran merasa dirugikan Jokowi akhirnya menempuh langkah hukum dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada 30 April.  
Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.  
Ade Ary turut menerangkan pihak terlapor dalam laporan itu dalam proses penyelidikan. Namun, pada prosesnya muncul sejumlah nama yang hingga saat ini masih dalam pendalaman.  
"Jadi makanya waktu itu rekan-rekan pernah bertanya apakah benar A, B, C, D itu terlapor, terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor se-laku korban dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini," ujarnya.(cnni/j)

gugatan yang belakangan dylayangkan ke Pengadilan Negeri Sleman dan masih terkait polemik ijazah. Kasmudjo masuk dalam salah satu daftar tergugat bersama rektor, empat wakil rektor, serta dekan juga kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM.  
Lagipula, kata Kasmudjo, ia sama sekali tak tahu perihal ijazah sarjana Jokowi yang belakan-gan ramai disorot.  
Dia juga tidak bisa bicara banyak soal isu ini lantaran sama sekali belum pernah melihat lang-sung ijazah yang diperdebatkan. Demikian pula proses kelulusan Jokowi itu sendiri, Kasmudjo mengklaim tak terlibat aktivitas pendampingan penyusunan skripsi yang bersangkutan.  
"Menge-nai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing (skripsi), tidak mengetahui, tidak ada prosesnya, karena pembimbingnya itu Prof. Sumitro. Pembantunya dan yang nguji ada sendiri, jadi kalau mengenai (tuduhan) ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita," bebarnya.  
"Jadi kalau itu nyangkutnya ke ijazah palsu ya ke situ, kalau saya pembimbing akademik pelajaran-pelajaran yang secara umum ya eng-gak bisa (disangkutpautkan)," katanya.(cnni/j)

## Roy Suryo Dicecar 26 Pertanyaan .....

Dari Halaman 1

menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan," kata Roy di Polda Metro Jaya, Kamis (15/5).  
Dari puluhan pertanyaan saat pemeriksaan itu, Roy menceritakan ihwal kisah hidupnya, mulai dari pendidikannya hingga pekerjaannya. Termasuk soal dirinya pernah menjabat sebagai Menpora.  
Dalam pemeriksaan itu, Roy mengaku dicecar terkait video hingga peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kendati demikian, Roy tak mem-beberkan secara rinci.

Di sisi lain, Roy turut mempertanyakan ihwal pasal yang dilaporkan dalam laporan tersebut. Khususnya terkait Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE.  
"Kebetulan dulu saya itu merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulang adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu de-lamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang," tutur dia.  
"Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyasari, jahat sekali," imbuhnya.  
Sebelumnya, Jokowi melaporkan lima orang

ke Polda Metro Jaya buntut tudingan ijazah palsu. Kelimanya yakni inisial RS, RS, ES, T, dan K.  
Mereka dilaporkan terkait Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik serta Pasal 311 KUHP tentang Fitnah. Selain itu juga Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.  
Jokowi menyampaikan alasan menempuh jalur hukum agar polemik ijazah ini bisa jelas dan gamblang. Ia juga mengaku baru baru sekarang menempuh jalur hukum lantaran sebelumnya masih menjabat sebagai presiden.  
"Ya ini, sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," kata dia, Rabu (30/4).(cnni/j)

## Megawati: Susah Amat, Kalau Betul .....

Dari Halaman 1

inggung langsung nama Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.  
Namun, dia menantang agar pihak yang sedang digugat, tak perlu ragu menunjukkan ijazahnya jika asli.  
"Orang banyak kok sekarang gonjang-gan-jing urusan ijazah, bener opo enggak? Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu loh," kata Mega.  
Megawati pada kesempatan itu mengatakan

bahwa BRIN memiliki ribuan peneliti. Menurut dia, BRIN saat ini total memiliki 8.144 peneliti.  
Dia meyakini ribuan peneliti itu adalah orang-orang pintar. Namun, dia mengaku tak mau kalah dan meminta agar ia menjalani tes IQ dan EQ.  
"Saya mesti cerita sedikit pengalaman kena-pa Pak Bambang Kesowo nulis (buku) sebegini tebalnya. Karena ketika saya ditugasi ke BRIN ini, terus saya punya researcher itu 8.144, wah saya pusing kepala. Kan ini pasti orang pintar semua ini," kata Mega.  
"Wah, tapi saya tidak mau kalah. Saya suruh

Pak Handoko, saya suruh di-testing dengan ilmu psikologi. Jadi IQ-nya sama EQ-nya intelligence quotient sama emotional quotient. Supaya apa? Ini benar pintar atau ngerepek ini," imbuhnya.  
Ijazah Jokowi yang dikeluarkan Univer-sitas Gadjah Mada (UGM) dituding palsu. Jokowi sudah melaporkan tuduhan ini ke Polda Metro Jaya. Di sisi lain ada pula laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal ijazah Joko-wi ini.  
UGM juga sudah beberapa kali membantah tuduhan ke-palsuan ijazah Jokowi.(cnni/j)

## Prabowo Tambah Kuota Rumah Subsidi .....

Dari Halaman 1

untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).  
Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.  
Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk

Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.  
"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Peny-uluh BKKBN, semakin mudah untuk mem-peroleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.  
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah

KPR FLPP.  
Melalui skema FLPP, pemerintah meny-ubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.  
Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membi-ayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.(cnni/j)

## Membangun Peradaban Islam dari Tanah .....

Dari Halaman 1

galon, Anak Beru, Anak Beru Menteri, Anak Beru Singikuri, Kalimbubu, Puang Kalimbubu. Masyarakat Karo terkenal dengan semangat keberkesannya dalam pergerakan merebut Kemerdekaan Indonesia, misalnya pertempuran melawan Belanda, Jepang, politik bumi hangus. Semangat patriotisme ini dapat kita lihat seka-rang dengan banyaknya makam para pahlawan di Taman Makam Pahlawan di Kota Kabanjahe yang didirikan pada tahun 1950.  
Penduduk Kabupaten Karo adalah dinamis dan patriotis serta taqwa kepada Tuhan Yang Esa. Masyarakat Karo kuat berpegang kepada adat istiadat yang luhur, merupakan modal yang dapat dimanfaatkan dalam proses pem-bangunan. Dalam kehidupan masyarakat Karo, idaman dan harapan (sura-sura pusuh peraten) yang ingin diwujudkan adalah pencapaian 3 (tiga) hal pokok yang disebut Tuah, Sangap, dan Mejuah-juah.  
Rakut Sitelu memiliki sistem kekerabatan yang serupa dengan Dalihan Na Tolu pada masyarakat suku Batak Toba, Batak Angkola dan Mandailing. Merga Silima adalah lima marga induk dalam Suku Karo. Kelima marga yang termasuk ke dalam Merga Silima adalah: Ginting, Karokaro, Peranganingin, Sembiring dan Tarigan.

Dalam adat Karo, "simantek kuta" adalah istilah yang merujuk pada pemimpin atau tetua adat di tingkat kuta (kampung). Mereka memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan men-jaga kelestarian budaya. Peran Simantek Kuta: Penyelesaian Sengketa: Simantek kuta bertugas sebagai penengah dalam sengketa tanah, tanah ulayat, atau sengketa lainnya yang terjadi di kuta.  
Pelaksanaan Upacara Adat: Simantek kuta memimpin pelaksanaan berbagai upacara adat, seperti perkawinan, kematian, atau upacara lainnya. Simantek kuta berperan penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi, norma, dan nilai-nilai budaya masyarakat Karo. Simantek kuta juga memiliki peran dalam pemerintahan kuta, bersama dengan ginemgem (keluarga terdekat) dan rayat derip (warga biasa). Pemimpin Komunitas: Simantek kuta adalah pemimpin komunitas di kuta, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan. Dalam suatu Kuta atau Desa, segala kepengurusan Kuta atau desa itu dipegang oleh Simantek Kuta ataupun ketu-runannya, dan dibantu oleh Senina.  
Suku Karo merupakan salah satu suku yang cukup populer di Sumatera Utara. Dilansir dari website Kemdikbud, suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Kabu-

paten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku Karo bahkan dijadikan sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Karo. Bahasa adat suku Karo dinamakan Bahasa Karo dan suku Karo juga memiliki salam yang khas yaitu Mejuah-juah. Selain bahasa dan salam yang khas, ternyata suku Karo memiliki konsep untuk menentukan hubungan dan kekerabatan dalam lingkungan mereka. Konsep ini disebut dengan Sangkep Nggeluh.  
**Makna Sangkep Nggeluh**  
Menurut Brepin Tarigan M.Sn, seorang dosen di Universitas Negeri Medan dalam artikelnya yang berjudul Karya Rakut Sitelu, Sangkep Nggeluh adalah keutuhan hidup sese-orang. Yang dimaksud dengan keutuhan yaitu unsur-unsur dalam adat istiadat yang mengatur masyarakat Karo. Jika seorang masyarakat etnis Karo tidak memiliki Sangkep Nggeluh, masyarakat itu boleh dikatakan belum sah men-jadi orang Karo. Untuk masyarakat pendatang yang menetap serta menikahi orang Karo, sese-orang itu akan dicarikan Sangkep Nggeluh-nya. Di dalam masyarakat etnis Karo, ada beberapa unsur yang menentukan Sangkep Nggeluh yaitu Merga Silima, Tutur Siwaluh, perkade-Kaden (Sepuluh Dua Tambah Sada dan Rakut Sitelu. (bersambung)

## Kapolri Pastikan .....

Dari Halaman 1

simbol tertentu, yang kita lihat adalah tindakannya. Ka-lau meresahkan masyarakat kita tindak tegas," jelasnya.  
"Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu sepanjang meresahkan masyarakat kita tidak kompromi dan kita tindak tegas," imbuhnya.  
Sigit mengaku telah menginstruksikan jajaran untuk menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) secara serentak sejak 1 Mei 2025.  
"Ja mengatakan, Operasi itu dilakukan untuk memberan-tas aksi premanisme hingga kejahatan lainnya seperti judi online, narkoba hingga terorisme.  
"Aksi premanisme, gangguan di wilayah perindustrian, isu debt collector, narkoba, judi online, penyelundupan, TPPO dan terorisme tentunya ini menjadi tugas yang di-titipkan oleh Bapak Presiden," tuturnya.  
Sigit menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan se-jumlah strategi untuk memberantas aksi premanisme yang belakangan bermunculan di beberapa wilayah.  
Hal itu, kata dia, diperlukan untuk memastikan program pemerintah dapat berjalan sehingga dapat membantu per-tumbuhan ekonomi maupun investasi.  
"Kami Polri konsen masalah itu dan kita akan kawal program-program tersebut. Ini menjadi komitmen kita be-sama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada," jelasnya.  
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo resah karena maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif.  
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang mengganggu iklim usaha.  
"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibung-kus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasmaka-kan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," jelasnya.(cnni/j)

## Gibran Minta .....

Dari Halaman 1

Bapak, Ibu yang kebetulan usianya di atas delapan pu-luhan tahun. Ini saya titip untuk para petugas, pendamp-ing, agar Bapak, Ibu yang sudah lansia ini diprioritaskan," ucapnya.  
Wapres juga mengingatkan pentingnya kesiapan dan kecepatan para petugas dalam merespons berbagai kebu-tuhan jemaah, termasuk apabila ada kondisi khusus yang memerlukan perhatian segera.  
"Jadi Bapak, Ibu jika nanti di sana ada kendala, membutuhkan obat, atau pun makanan-makanan tertentu, mungkin di sini ada pantangan ini, pantangan makan itu, nanti langsung disampaikan ke petugas. Yang jelas, petu-gas nanti harus siap, sigap, gerak cepat untuk membantu Bapak, Ibu yang sedang beribadah ini," katanya. (ant/j)



## Mujtahid Digital dan Etika Islam

Dari Halaman 1

dalam praksis keberagamaan umat Islam?  
**Antara Alat dan Otoritas**  
Islam mengenal konsep ijthihad sebagai upaya intelektu-al seorang yang berkompeten dalam menggali hukum dari sumber primer agama. Ijthihad menuntut akal yang jernih, keilmuan mendalam, serta kesadaran moral dan spiritual. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat menjadi mujta-hid, apalagi entitas non-manusia seperti AI.  
Meskipun AI mampu mengakses ribuan literatur dalam hitungan detik, kemampuannya tetap bersifat teknis—tidak memiliki niat, tanggung jawab, dan kesadaran yang menjadi ciri etika Islam. AI tidak beriman, tidak berdos, dan tidak bertakwa. Ia tidak bisa menanggung beban moral dari fatwa yang dihasilkannya.  
Dengan demikian, AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu atau asisten digital dalam pengelolaan ilmu keislaman, bukan sebagai otoritas keagamaan.  
**Risiko Reduksi Spiritualitas**  
Keberagamaan dalam Islam tidak semata rasional, melainkan juga spiritual dan emosional. AI memang dapat menyampaikan ayat atau hadis, tetapi tidak dapat merasakan makna batin dari bacaan tersebut. Ia tidak bisa berdo'a, tidak bisa merintih dalam tahajud, dan tidak mampu menyentuh kalbu manusia dengan kasih sayang seorang da'i.  
Inilah tantangan kita: bagaimana mempertahankan dimensi ruhani dan kemanusiaan dalam praktik keislaman yang semakin terdigitalisasi. Islam tidak sekadar infor-masi, tetapi transformasi jiwa.  
**Maqashid Syariah dan Etika Data**  
Dari perspektif maqashid syariah—tujuan-tujuan utama hukum Islam—kehadiran AI harus dilihat melalui lensa kemaslahatan dan perlindungan. Prinsip seperti hifzh al-din (menjaga agama), hifzh al-'aql (menjaga akal), dan hifzh al-nafs (menjaga jiwa) harus menjadi dasar dalam pengembangan teknologi keislaman.  
AI yang mengakses data keagamaan pribadi—seperti pola ibadah, transaksi zakat, hingga pertanyaan fikih—membutuhkan regulasi ketat terkait perlindungan data dan keamanan privasi. Jangan sampai kemudahan digital menjerumuskan umat dalam jebakkan kapitalisasi atau manipulasi berbasis algoritma.  
**Etika Islam Digital**  
Sudah saatnya umat Islam menyusun kerangka etika Islam digital. Ini bukan sekadar himbauan moral, melain-kan tanggung jawab kolektif para ulama, cendekiawan Muslim, dan pengembang teknologi. Prinsip-prinsip seperti verifikasi manusia atas jawaban AI, transparansi sumber data, serta batasan otoritas digital perlu dirumus-kan dan disosialisasikan.  
AI bisa menjadi mitra dalam dakwah dan pendidikan, tetapi harus tetap dalam kendali nilai-nilai ilahiyah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu, tetapi juga memuliakan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.  
**Penutup**  
AI akan terus berkembang, dan umat Islam tidak dapat menghindar dari arus digitalisasi. Namun, tugas kita bu-kan hanya mengikuti zaman, melainkan membimbingnya. Teknologi harus diletakkan dalam bingkai nilai, bukan menggantikannya.  
AI bukan mujtahid. Ia tidak akan dimintai pertang-gungjawab di akhirat. Tetapi masalahnya yang akan dimintai tanggung jawab atas bagaimana AI digunakan: apakah untuk maslahat, atau justru untuk mengaburkan makna agama.